

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Himpunan Mahasiswa Islam merupakan sebuah organisasi mahasiswa Islam yang didirikan oleh Lafran Pane pada 5 Februari 1947 dengan tujuan untuk menghimpun kekuatan mahasiswa Islam di Indonesia dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer belanda dan mempertahankan nilai-nilai Keislaman di Indonesia. HMI juga merupakan organisasi mahasiswa islam pertama di Indonesia yang telah menjelma menjadi salah satu organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia.¹

Sepak terjang Himpunan Mahasiswa Islam sejak awal didirikan sudah terbukti dalam catatan sejarah. Seperti pembentukan corps mahasiswa sebagai regu pembantu Tentara Keamanan Rakyat pada masa mempertahankan kemerdekaan bangsa.²

Terlepas dari nama besar HMI ternyata tidak luput dari konflik internal. Dewasa ini banyak terjadi konflik-konflik internal yang didasarkan pada landasan kepentingan berbagai kelompok di dalam tubuh HMI. Ternyata dalam sejarahnya, HMI pernah mengalami konflik internal yang membuat organisasi seolah memiliki dua poros yang di dasari oleh perbedaan pandangan yang mengakar di seluruh cabang-cabang yang ada di Indonesia.

Pada Masa Orde Baru, presiden Soeharto menerapkan Asas Tunggal Pancasila yang mengharuskan seluruh organisasi masyarakat dan partai politik menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Peraturan ini ditetapkan melalui Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.³ Penerapan peraturan ini bertujuan untuk menjaga integritas negara, mencegah radikalisasi, dan memperkuat konsensus nasional di tengah keberagaman Indonesia. Meskipun memiliki tujuan positif, kebijakan ini juga menimbulkan

¹ Abdurrahman, Sejarah Himpunan Mahasiswa Islam. Jakarta: Gema Insani Press.

² Sitompul, A. Historiografi HMI 1947–1993. Jakarta: Intermasa.

³ Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Pasal 2 ayat (1).

kontroversi dan perdebatan, terutama dalam hal kebebasan berorganisasi dan kebebasan ideologi. Masyarakat dan organisasi yang berbeda pandangan dengan kebijakan ini merasa adanya pembatasan terhadap hak-hak demokratis.

Pro dan kontra pun terjadi didalam tubuh HMI. Diawali dari Kongres ke-15 HMI yang berlangsung di Medan pada 22-29 Mei 1983. Isu terkait asas tunggal Pancasila sudah mewarnai ketegangan suasana kongres. Hal ini diakibatkan oleh campur tangan pemerintah melalui Abdul Gafur yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu sekaligus salah satu alumni HMI. Abdul Gafur memberi syarat kepada PB HMI agar mendapat izin untuk mengadakan kongres yaitu dengan keharusan penerimaan asas tunggal Pancasila. Akan tetapi karena aturan main yang diatur didalam kongres mengharuskan suatu keputusan disetujui apabila mendapatkan suara mayoritas dari peserta kongres (berstatus penuh) maka dengan kekuatan dominan mayoritas utusan cabang mampu untuk mengatasi suara dari PB HMI. Hingga akhirnya kongres ke-15 HMI menetapkan bahwasannya asas organisasi tetap mempertahankan asas Islam dan menetapkan Hary Azhar Azis sebagai ketua umum PB HMI. Namun selama perjalanan menuju kongres selanjutnya ternyata terjadi dinamika internal yang mengharuskan HMI mengalami pergolakan internal secara nasional. Puncaknya terjadi pada kongres ke-16 PB HMI di Padang pada bulan Maret 1986. Terdapat dua poros yang terbentuk bahkan hingga saat ini yaitu kelompok yang menerima Pancasila sebagai azas tunggal dan kelompok yang menolak dan beralasan bahwa HMI harus tetap pada azas Islam. Bahkan konflik ideologis ini mengakar hingga hari ini. Penelitian ini berupaya untuk melihat lebih dalam bagaimana terjadinya konflik di tubuh HMI dan mencoba mengaitkan dengan teori konflik.

Kajian mengenai konflik internal dalam tubuh Himpunan Mahasiswa Islam HMI, khususnya pasca penerapan kebijakan Asas Tunggal Pancasila pada masa Orde Baru, telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan beragam pendekatan. Namun, terdapat perbedaan fokus dan sudut pandang yang menunjukkan masih terbukanya ruang untuk kajian lebih lanjut, terutama dalam melihat konflik sebagai suatu pola yang sistematis.

Penelitian yang dilakukan oleh Sinang Pinasthiko (2009) mengkaji konflik ideologis HMI pasca penerapan Asas Tunggal Pancasila tahun 1985 dalam skala nasional. Penelitian ini menyoroti bagaimana intervensi negara melalui kebijakan tersebut memicu perpecahan dalam tubuh HMI yang kemudian melahirkan dua faksi besar, yaitu HMI DIPO dan HMI MPO. Fokus utama penelitian ini terletak pada relasi antara negara dan organisasi mahasiswa serta dampaknya terhadap ideologi organisasi. Meskipun memberikan gambaran komprehensif mengenai konflik ideologis, penelitian ini masih menempatkan konflik sebagai peristiwa historis tanpa menguraikan pola perkembangan konflik secara bertahap.

Selanjutnya, penelitian oleh Vivi Y. A. (2014) mengangkat peran HMI Cabang Surabaya dalam proses penerimaan Asas Tunggal Pancasila. Dengan menggunakan pendekatan sejarah lisan, penelitian ini menekankan pada dinamika lokal dan pengalaman kader dalam merespons kebijakan negara. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi sikap di tingkat cabang terhadap kebijakan tersebut. Namun, fokus yang bersifat lokal membuat penelitian ini belum mampu menjelaskan dinamika konflik dalam skala nasional maupun pola umum yang terjadi di berbagai cabang HMI.

Kajian lain dilakukan oleh Rahmatsyah (2021) yang membahas Pancasila dalam perspektif HMI MPO. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis ideologi dan cara pandang kelompok MPO terhadap Pancasila. Dalam konteks ini, konflik dipahami sebagai perbedaan interpretasi ideologis antara kelompok yang menerima dan menolak asas tunggal. Meskipun memberikan pemahaman mendalam mengenai posisi ideologis salah satu faksi, penelitian ini belum mengkaji konflik sebagai proses sosial yang melibatkan dinamika kekuasaan dan kepentingan.

Sementara itu, penelitian oleh Zuhri Humaidi (2010) melihat konflik dalam kerangka hubungan antara Islam dan negara pada masa penerapan kebijakan Asas Tunggal. Fokus penelitian ini lebih luas, yaitu pada pergulatan antara ideologi keagamaan dan kebijakan negara dalam konteks politik Orde Baru. Dengan demikian, HMI diposisikan sebagai bagian dari fenomena yang lebih

besar. Kelemahan dari pendekatan ini adalah kurangnya perhatian terhadap dinamika internal organisasi yang menjadi arena utama konflik.

Selain itu, M. A. Chozin (2009) menyoroti peran kebijakan Asas Tunggal Pancasila dalam membendung perkembangan ideologi Islam garis keras. Penelitian ini menempatkan negara sebagai aktor dominan dalam mengendalikan kehidupan organisasi masyarakat. Perspektif ini penting untuk memahami konteks eksternal konflik, namun belum cukup menjelaskan bagaimana konflik berkembang di dalam tubuh organisasi itu sendiri.

Di sisi lain, sejumlah kajian mengenai HMI juga menyoroti aspek nilai dan ideologi organisasi. Misalnya, penelitian tentang nilai-nilai dasar perjuangan HMI menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki fondasi ideologis yang kuat berbasis Islam, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Fondasi ini menjadi faktor penting dalam menjelaskan mengapa kebijakan Asas Tunggal Pancasila memicu resistensi di kalangan kader HMI. Namun, kajian semacam ini cenderung bersifat normatif dan belum mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan dinamika konflik organisasi secara konkret.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai HMI pasca penerapan Asas Tunggal Pancasila umumnya terbagi ke dalam tiga kecenderungan utama, yaitu kajian deskriptif historis mengenai konflik, kajian ideologis mengenai perbedaan pandangan terhadap Pancasila, dan kajian politik yang menekankan peran negara dalam mengendalikan organisasi masyarakat. Meskipun memberikan kontribusi penting, ketiga pendekatan tersebut belum secara komprehensif menjelaskan konflik sebagai suatu pola yang memiliki tahapan dan mekanisme tertentu.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis konflik dalam tubuh HMI sebagai suatu pola yang berkembang secara sistematis. Dengan menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf, penelitian ini tidak hanya melihat konflik sebagai peristiwa atau perbedaan ideologi semata, tetapi sebagai proses sosial yang melibatkan distribusi kekuasaan, pertarungan kepentingan, serta pembentukan faksi dalam organisasi. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika konflik HMI pada masa penerapan Asas Tunggal Pancasila dalam skala nasional.

Meskipun konflik HMI pasca penerapan Asas Tunggal Pancasila telah banyak dibahas, sebagian besar penelitian masih berfokus pada kronologi peristiwa dan perbedaan ideologis antara kelompok penerima dan penolak asas tunggal. Penelitian ini berupaya melihat konflik tersebut sebagai suatu proses yang berkembang secara bertahap, mulai dari munculnya perbedaan sikap, polarisasi internal, pembentukan faksi, hingga terjadinya fragmentasi organisasi. Dengan demikian, fokus penelitian tidak hanya pada peristiwa perpecahan, tetapi pada dinamika yang memungkinkan konflik berkembang menjadi fragmentasi organisasi.

Penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan melihat konflik HMI sebagai suatu proses yang berkembang secara bertahap. Fokus penelitian tidak hanya pada perpecahan organisasi, melainkan pada bagaimana konflik berkembang dari perbedaan sikap terhadap kebijakan Asas Tunggal Pancasila, kemudian mengalami polarisasi, pembentukan faksi, hingga menghasilkan fragmentasi organisasi. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menjelaskan transformasi konflik dalam tubuh HMI sebagai suatu proses sosial dan organisasi yang berlangsung secara sistematis pada periode 1983–1986.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada dinamika konflik internal HMI yang berkembang pasca munculnya perbedaan sikap terhadap kebijakan Asas Tunggal Pancasila hingga menghasilkan fragmentasi organisasi pada tahun 1986.

Secara spasial penelitian ini dibatasi di skala nasional. Secara temporal penelitian ini mencakup tahun 1983 ketika kongres HMI ke-15 di Medan hingga terjadinya pembentukan Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) pada 1986. Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka perumusan masalah di penelitian ini adalah

1. Bagaimana respons HMI terhadap kebijakan Asas Tunggal Pancasila pada periode 1983–1986?
2. Bagaimana konflik internal HMI berkembang dari perbedaan sikap menjadi polarisasi organisasi?
3. Bagaimana proses polarisasi tersebut menghasilkan fragmentasi organisasi menjadi HMI DIPO dan HMI MPO?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik internal Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada masa penerapan kebijakan Asas Tunggal Pancasila tahun 1983–1986. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji respons HMI terhadap kebijakan Asas Tunggal Pancasila yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru serta menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi dinamika internal organisasi.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan konflik internal HMI dari munculnya perbedaan sikap terhadap kebijakan Asas Tunggal, berkembang menjadi polarisasi organisasi, hingga terbentuknya kelompok-kelompok yang saling berhadapan dalam memperjuangkan pandangan dan kepentingannya masing-masing.

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses fragmentasi organisasi yang terjadi dalam tubuh HMI hingga lahirnya dua kelompok besar, yaitu HMI DIPO dan HMI MPO. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat konflik sebagai peristiwa historis semata, tetapi juga sebagai proses sosial dan organisasi yang berkembang secara bertahap di bawah tekanan politik Orde Baru.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sejarah organisasi dan sejarah politik Indonesia, khususnya dalam memahami dinamika konflik internal organisasi mahasiswa pada masa Orde Baru. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memperkaya penggunaan teori konflik dan faksionalisme dalam analisis sejarah dengan

menunjukkan bagaimana kedua pendekatan tersebut dapat digunakan untuk membaca konflik organisasi secara lebih sistematis dan komprehensif.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi kader HMI dan organisasi mahasiswa lainnya dalam memahami dinamika konflik internal organisasi, khususnya yang berkaitan dengan perbedaan ideologi dan kepentingan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan refleksi dalam menjaga keutuhan organisasi serta mengelola perbedaan secara konstruktif di masa yang akan datang.

D. Kerangka Analisis

Penelitian ini menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf sebagai landasan analitis untuk memahami dinamika konflik internal Himpunan Mahasiswa Islam pada masa penerapan kebijakan Asas Tunggal Pancasila tahun 1983–1986. Menurut Dahrendorf, konflik merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan sosial karena setiap organisasi memiliki distribusi otoritas yang tidak merata. Perbedaan kepentingan yang muncul dari distribusi otoritas tersebut berpotensi melahirkan pertentangan antar kelompok yang kemudian berkembang menjadi konflik terbuka.⁴

Dalam teori Dahrendorf, konflik tidak dipahami sebagai peristiwa yang muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai proses yang berkembang melalui berbagai tahapan. Dahrendorf menjelaskan adanya konflik laten, quasi group, interest group, dan conflict group yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana suatu pertentangan berkembang dari ketidakpuasan yang masih tersembunyi hingga menjadi konflik yang terorganisasi. Konsep-konsep tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis untuk membaca perkembangan konflik yang terjadi dalam tubuh HMI selama periode 1983–1986.

Dalam penelitian ini, teori konflik Dahrendorf digunakan untuk menjelaskan perkembangan konflik dari perbedaan kepentingan menuju konflik

⁴ Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press.

yang terorganisasi. Sementara itu, teori faksionalisme digunakan untuk menjelaskan bagaimana konflik tersebut menghasilkan pembentukan kelompok-kelompok yang saling bersaing dalam organisasi hingga berujung pada fragmentasi. Dengan demikian, kedua teori digunakan secara saling melengkapi untuk menjelaskan proses transformasi konflik dalam tubuh HMI.

Dengan menggunakan teori konflik Dahrendorf, penelitian ini berupaya menganalisis konflik HMI tidak hanya sebagai peristiwa perpecahan organisasi, tetapi sebagai proses yang berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana konflik internal HMI berkembang dari perbedaan sikap terhadap kebijakan Asas Tunggal Pancasila menjadi polarisasi organisasi, pembentukan faksi, dan akhirnya menghasilkan fragmentasi organisasi pada tahun 1986.

E. Metode dan Sumber

Metode yang digunakan adalah penelitian historis yang meliputi 5 tahapan yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi sumber, interpretasi dan historiografi.⁵

Tahap awal adalah pemilihan topik yaitu mengenai asas tunggal Pancasila dan dinamika Himpunan Mahasiswa Islam. Didasarkan pada pecahnya HMI menjadi dua kubu yakni HMI Dipo dan HMI MPO yang terjadi hingga hari ini akibat pertentangan ideologis yang disebabkan diberlakukannya kebijakan asas tunggal Pancasila oleh pemerintah orde baru tahun 1985.

Selanjutnya adalah tahapan Heuristik/pengumpulan sumber. Sumber yang akan digunakan peneliti meliputi sumber primer seperti buku serta arsip-arsip dokumen organisasi maupun surat kabar yang memuat informasi terkait topik ini seperti hasil-hasil kongres, laporan konferensi cabang, serta surat kabar. terlepas dari keberpihakan mereka dalam faksi DIPO maupun MPO pada kurun waktu yang sesuai dengan topik peneliti. Peneliti juga akan mengumpulkan dan

⁵ Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.

menggunakan sumber sekunder berupa buku-buku, artikel jurnal dan dokumen-dokumen terkait.

Tahap selanjutnya adalah verifikasi/kritik sumber. Sumber-sumber yang telah dikumpulkan akan di verifikasi atau di kritik keaslian serta keakuratan sumber melalui kritik internal dan eksternal. Kritik sumber primer akan dilakukan dengan menguji keaslian dan kredibilitas sumber fisik dan sumber lisan. Sedangkan sumber sekunder akan diuji dengan membandingkannya dengan sumber primer lain. Misalnya dengan membandingkan antara Sejarah Himpunan Mahasiswa Islam tulisan Abdurrahman dengan Historiografi HMI karya Agussalim.

Setelah semua sumber telah di verifikasi tahapan selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi data dilakukan dengan menyimpulkan sumber yang telah diuji kredibilitasnya dan disatukan menjadi narasi deskriptif yang menjadi isi pembahasan dari penelitian. Contoh nya kesimpulan yang relevan dari buku *Himpunan Mahasiswa Islam dan Kebijakan Orde Baru: Studi tentang Kontroversi Penerapan Azas Tunggal* karangan Wibowo, dijadikan sebuah narasi deskriptif tentang isi pembahasan penelitian.

Lalu masuk ke tahapan terakhir yaitu historiografi. Tahapan yang sudah dilakukan dari awal yang sudah ditulis dalam bentuk karya tulis ilmiah yang membahas tentang Asas Tunggal Pancasila dan Dinamika HMI 1983-1986 yang dapat dipertanggungjawabkan dan di uji. Penulisan dilakukan secara deskriptif naratif, yaitu penulisan berisi penjelasan analisis menurut sumber-sumber yang dianalisis menggunakan metode historis.